



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 430/II.03/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik, pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu sektor yang hendak dicapai dalam RPJM 2010-2014;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi dalam mengukur perkembangan demokrasi dan menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik serta mendukung pengumpulan data berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi, dipandang perlu keterlibatan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B.06/Menko/Polhukam/01/2012 Perihal Pembentukan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/526/SJ tanggal 21 Februari 2012 Perihal Pengembangan dan Revisi Surat Keputusan Pokja Pengembangan Demokrasi Propinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- b. memberikan masukan penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- c. melakukan pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi;
- d. melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dalam proses pengumpulan data dan kualitas data yang dihasilkan;
- e. melaksanakan pendampingan dalam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi perencanaan pembangunan politik; dan
- f. terlibat aktif, dalam upaya desiminasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat Provinsi.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Pokja yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, dengan tugas membantu sekretaris dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); dan
- c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA 2014 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-5-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Pusat Statistik RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Pokja dan Sekretariat Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /II.03/HK/2014
 TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN
 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua	200.000	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
4.	Kasubdit Politik Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung	Anggota	175.000	
5.	Kasitter Korem 043/Garuda Hitam	Anggota	175.000	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Dekan FISIP Universitas Lampung	Anggota	175.000	
11.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
12.	Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
13.	USKUP Keuskupan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
14.	Ketua WALUBI Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
15.	Wakil Sekretaris Litbang DPD KNPI Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
16.	Ketua FPK Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
17.	Pemimpin Redaksi SKH Radar Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.03/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.
2.	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
4.	Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Orpol, Ormas dan LSM Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Pimpinan Redaksi SKH Tribun Lampung	Anggota	175.000	
8.	Dr. DEDI HERMAWAN (Akademisi FISIP Universitas Lampung)	Anggota	175.000	
9.	RITA KENCANA (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	SUDIASI (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	YANTI ROZALI (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	SRI HARYATUN, S.IP. (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	UMI MUSYAFATUR RIFATIN (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	SULISDIANTO (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15.	WULAN NINGSIH, A.Md. (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
16.	RESTI MARYANI, A.Md. (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
17.	SEPTIANI, S.Kom (JFU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.